

Dua Belas Tahun Aksesibilitas Keanggotaan Arab Saudi dalam *World Trade Organization* (WTO) : Pengaruh Politik Dalam Negeri

Disusun oleh Malinda Budi Wiranti

(070912005)

ABSTRAK

Sejak berdiri pada 1995, lebih dari 20 negara anggota baru telah bergabung dalam World Trade Organization (WTO). Berbagai keuntungan perdagangan diperoleh negara-negara dengan bergabung ke dalam WTO sehingga mendorong negara-negara, baik negara berkembang maupun negara maju, yang belum menjadi anggota WTO untuk segera bergabung melalui proses aksesibilitas tak terkecuali Arab Saudi. Pada tahun 2005, Arab Saudi resmi menjadi anggota WTO yang ke 149 setelah melalui proses panjang aksesibilitas keanggotaan selama dua belas tahun (1993-2005). Proses aksesibilitas keanggotaan Arab Saudi tersebut merupakan salah satu yang terlama dibanding dengan aksesibilitas-aksesibilitas negara lain, padahal tahapan-tahapan dalam aksesibilitas berlaku sama bagi semua negara.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana dinamika politik dalam negeri Arab Saudi mempengaruhi lamanya proses aksesibilitas. Teori input-output sistem politik David Easton digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan diambil di Arab Saudi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dampak dari kebijakan tersebut. Teori rentier state kemudian digunakan untuk menganalisis pengaruh perekonomian Arab Saudi sebagai bagian dari politik dalam negerinya terhadap lamanya proses aksesibilitas. Berdasarkan kedua teori tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah salah satu faktor penyebab lamanya proses aksesibilitas Arab Saudi ke dalam WTO adalah kondisi politik dalam negeri Arab Saudi yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang terfragmentasi dan belum terpusat, kepentingan ekonomi negara Arab Saudi maupun aktor-aktor non negara sebagai bagian dari politik dalam negeri yang dipengaruhi status Arab Saudi sebagai rentier state, serta pengaruh agama dalam pembuatan keputusan yang ditunjukkan oleh pengaruh Syariat (hukum Islam) sebagai sistem legal di Arab Saudi. Kombinasi dari ketiga faktor yang saling mempengaruhi tersebut kemudian menghambat jalannya negosiasi-negosiasi Arab Saudi dengan negara-negara anggota WTO yang lainnya sehingga proses aksesibilitasnya memakan waktu hingga dua belas tahun.

Kata Kunci: WTO, aksesibilitas, *rentier state*, sistem politik Easton, syariat Islam, politik domestik Arab Saudi

Dua Belas Tahun Aksesibilitas Keanggotaan Arab Saudi dalam *World Trade Organization* (WTO) : Pengaruh Politik Dalam Negeri

Disusun oleh Malinda Budi Wiranti

(070912005)

World Trade Organization (WTO) sebagai satu-satunya organisasi internasional yang menangani peraturan-peraturan perdagangan antara negara-negara merupakan hasil dari perundingan dalam Putaran Uruguay (1986-1994) serta negosiasi-negosiasi di bawah *General Agreements on Tariffs and Trade* (GATT). (http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm). Hingga Maret 2013, WTO telah beranggotakan 159 negara. WTO dianggap memberikan berbagai kemudahan dalam perdagangan bagi anggotanya. Melalui WTO, negara-negara anggota lebih mudah untuk memasuki perdagangan internasional, mengundang lebih banyak *foreign direct investment* (FDI), dan diterima dalam bisnis internasional. Oleh karena itu sejak resmi berdiri pada 1 Januari 1995 lebih dari 30 negara mengajukan diri untuk menjadi anggota WTO melalui aksesibilitas termasuk negara-negara pecahan Soviet, negara-negara Asia, serta Timur Tengah.

Proses Aksesibilitas Keanggotaan Arab Saudi dalam WTO

Di antara aksesibilitas-aksesibilitas yang terjadi, terdapat suatu fenomena menarik yaitu proses aksesibilitas Arab Saudi yang memakan waktu sangat lama. Arab Saudi mengajukan diri pada 1993, bahkan sejak WTO masih berbentuk GATT, dan baru resmi menjadi anggota WTO pada 2005 (http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm). Pasal XII *Marakeesh Agreement* yang mengatur aksesibilitas memang hanya menyebutkan bahwa negara baru bisa menjadi anggota WTO “on terms to be agreed” atau dalam kondisi dan kurun waktu yang akan disepakati kemudian (Evenet 2011, 2). Hal ini berarti WTO tidak mematok kurun waktu yang spesifik untuk proses aksesibilitas. Anomali terjadi pada proses aksesibilitas keanggotaan Arab Saudi ke WTO karena dibandingkan dengan negara-negara besar yang lain, proses aksesibilitas Arab Saudi tersebut tergolong salah satu yang terlama. Sebagai pembandingan, aksesibilitas Cina ke WTO hanya memakan waktu enam tahun (http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm), aksesibilitas Oman sebagai salah satu anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC) hanya memakan waktu empat tahun (http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/oman_e.htm). Bahkan di antara negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC), Arab Saudi adalah yang terakhir menjadi anggota WTO, dengan kata lain proses aksesibilitasnya yang paling lama di antara negara-negara tersebut. (Oxford Analytica Daily Brief Service 2005).

Secara umum, aksesibilitas untuk menjadi anggota WTO melalui empat tahapan yaitu permintaan resmi untuk menjadi anggota, negosiasi dengan seluruh anggota WTO, menyusun draft keanggotaan baru, dan keputusan akhir (Jenie 2010, 20). Prosesnya adalah suatu negara “X” menyerahkan “*Memorandum of the Foreign Trade Regime*” yang berisi data-data mengenai perdagangan internasionalnya. Selanjutnya data-data tersebut akan diperiksa oleh negara-negara anggota WTO yang berpartisipasi dalam *Working Party* (WP). Tahap selanjutnya adalah para anggota WP menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tertulis berkaitan dengan memorandum tersebut dan harus dijawab oleh negara X. Negara X harus melakukan negosiasi bilateral mengenai aksesibilitas pasar dengan setiap anggota WP. Setelah berhasil melakukan perjanjian-perjanjian bilateral, tahap akhir dari aksesibilitas negara tersebut adalah pembuatan *draft* berbagai dokumen termasuk laporan WP, keputusan WTO, keanggotaan negara tersebut, serta protokol aksesibilitas (McClatchy 2004, 1).

Dalam setiap proses aksesinya suatu negara harus melakukan dua macam negosiasi yaitu negosiasi multilateral dan negosiasi bilateral dengan masing-masing negara anggota WTO, yang menjadi menarik kemudian adalah cara pengambilan keputusan dalam WTO. Sesuai dengan pasal IX *Marrakesh Agreement* sistem pengambilan keputusan dalam WTO adalah konsensus. Hal ini juga berlaku dalam pengambilan keputusan aksesinya keanggotaan suatu negara baru dalam WTO sebagaimana dijelaskan dalam pasal XII *Marrakesh Agreement* ayat 3 bahwa aksesinya keanggotaan suatu negara baru bisa diterima jika telah disetujui oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota WTO. Berarti untuk diterima sebagai anggota WTO Arab Saudi harus berupaya agar negosiasi bilateralnya disetujui minimal oleh lebih dari dua pertiga negara-negara anggota WTO yang lain. Tahapan-tahapan dan syarat untuk menjadi anggota WTO tersebut berlaku sama bagi semua negara yang ingin menjadi anggota WTO. Pada kenyataannya, lamanya waktu yang harus ditempuh pada aksesinya keanggotaan WTO berbeda-beda pada setiap negara anggota baru, dan Arab Saudi menjadi salah satu yang terlama. Berarti ada faktor lain yang dapat mempengaruhi lamanya proses aksesinya keanggotaan suatu negara dalam WTO.

Arab Saudi mengajukan permintaan aksesinya ke WTO pada 12 Juni 1993. Sebuah *working party* dibentuk pada 1996, dan selanjutnya berbagai negosiasi mulai dijalankan. Pada tahun 1997, pemerintah Arab Saudi berharap bahwa pada akhir tahun tersebut aksesinya keanggotaan Arab Saudi sudah disetujui oleh seluruh anggota WTO. Namun sayang, negosiasi berjalan semakin kompleks karena penawaran Arab Saudi mengenai akses pasar mendapat kritik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain. Tarif yang dikenakan oleh Arab Saudi dinilai terlalu tinggi. Negosiasi terus berjalan tanpa ada perkembangan yang signifikan, ditambah dengan permintaan Arab Saudi agar diperlakukan sebagai negara berkembang, dengan tujuan untuk mempermudah proses negosiasi. Pada tahun 1999, terdapat suatu spekulasi bahwa jika hingga akhir tahun 2000 Arab Saudi belum juga diterima sebagai anggota WTO, maka aksesinya keanggotaannya akan dibatalkan. Pada kenyataannya, hingga akhir tahun 2000 Arab Saudi belum juga diterima menjadi anggota WTO namun aksesinya tetap dijalankan. Hanya saja Arab Saudi sama sekali tidak memberikan respon terhadap undangan negosiasi dari Amerika Serikat terkait aksesinya keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO (Hertogg 2008, 16). Tak disangka-sangka pada tahun 2001 Arab Saudi menurunkan sebagian besar tarifnya menjadi 5% berkaitan dengan pembentukan persatuan *Gulf Cooperation Council* (GCC). Keputusan tersebut diperkirakan akan mempermudah aksesinya keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO (Hertog 2008, 21).

Abdullah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengambil kebijakan *reshuffle* kabinet pada bulan April tahun 2003 yang juga mengakibatkan pergantian menteri perdagangan Arab Saudi dari Osama Faqeeh menjadi Hashim Yamani (Hertog 2008, 18). Setelah Kementerian Perdagangan Arab Saudi berada di bawah pimpinan Hashim Yamani, akses pasar Arab Saudi semakin terbuka. Sekularitas terus diperkenalkan, salah satunya adalah pembentukan komite khusus yang menangani permasalahan komersial (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html>). Beberapa diantara komite khusus tersebut adalah *Saudi Arabia General Investment Authority* (SAGIA) dan *Saudi Arabia Monetary Agency* (SAMA). Pada tahun 2003, Arab Saudi akhirnya menandatangani kesepakatan bilateral dengan Uni Eropa (Oxford Analytica Daily Brief Service 2005, 2). Kesepakatan tersebut berkaitan dengan pembukaan akses bebas ke Arab Saudi untuk barang dan jasa seperti servis keuangan, telekomunikasi, transportasi, dan konstruksi. Selain itu, yang terpenting adalah penghapusan harga ganda untuk gas alam Arab Saudi dan penghapusan eksklusifitas sektor energi Arab Saudi dari perusahaan-perusahaan asing. Setelah menandatangani kesepakatan dengan Uni Eropa tersebut, Arab Saudi masih perlu melakukan negosiasi dengan beberapa anggota WTO yang lain. Hingga pada 2005, Arab Saudi menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat mengenai keterbukaan Arab Saudi untuk menerima jasa asuransi dan cabang dari bank-bank Amerika Serikat di Arab Saudi, serta menyudahi boikotnya atas Israel (Oxford Analytica Daily Brief Service 2005, 3). Kesepakatan tersebut sekaligus mengakhiri tahapan panjang aksesinya

keanggotaan Arab Saudi ke WTO, dengan kata lain Arab Saudi telah resmi menjadi anggota WTO pada Agustus 2005.

Salah satu permintaan negara-negara WTO yang sulit dipenuhi oleh Arab Saudi adalah permintaan pembukaan akses pasar (impor) untuk semua produk pertanian termasuk produk-produk yang dilarang oleh Islam seperti daging babi dan alkohol (Chemingui 2008, 25). Hal ini berkaitan dengan dasar hukum negara Arab Saudi yang dikeluarkan pada tahun 1992 oleh Raja Fahd. Sesuai dengan pasal 1 dalam konstitusi tersebut, hukum Islam adalah landasan hukum yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi “... Its constitution is Almighty God's Book, The Holy Qur'an, and the Sunna (Traditions) of the Prophet (PBUH). Arabic is the language of the Kingdom. The City of Riyadh is the capital” (http://www.saudiembassy.net/about/countryinformation/laws/The_Basic_Law_Of_Governance.aspx). Dengan demikian setiap aturan dan kebijakan yang diambil berlandaskan al-Quran dan sunnah rasul. Aturan tersebut juga berdampak pada sistem yang berlaku dalam pemerintahan Arab Saudi yaitu sistem syariat. Syariat menjadikan Arab Saudi tetap memaksa untuk mendapatkan pengecualian terkait pembukaan akses pasar terkait produk-produk yang dilarang oleh Islam.

Selama dua belas tahun akses keanggotaan ke dalam WTO, Arab Saudi terlibat berbagai negosiasi dengan anggota-anggota WTO yang lain, baik bilateral maupun multilateral mengenai *International Property Rights* (IPR), penurunan tarif, amandemen hukum dan pemecahan sengketa. Selain mengenai IPR dan tarif, negosiasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam akses WTO juga meliputi akses pasar dan pertanian. Selain itu, Arab Saudi juga harus memenuhi prinsip-prinsip WTO seperti *Most Favoured Nation* (MFN) atau perlakuan yang sama untuk semua negara anggota WTO dan perlakuan yang sama untuk perdagangan di luar dan di dalam negeri (www.wto.org). Arab Saudi juga harus membuka perekonomiannya dan menerima investasi serta mengikuti peraturan-peraturan WTO, termasuk memberlakukan transparansi ekonomi (Bourland 2006, 3). Berbagai kebijakan perdagangan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi tersebut berkaitan dengan negosiasi bilateral dan multilateral antara pemerintah Arab Saudi dengan anggota-anggota WTO yang lain.

Pemerintahan dan Perekonomian Arab Saudi Selama Proses Akses Berlangsung

Akses keanggotaan suatu negara ke dalam WTO yang mengharuskan dilakukannya negosiasi-negosiasi terkait kebijakan perdagangan tidak dapat dipisahkan dari faktor eksternal negeri seperti birokrasi dalam WTO, negara dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai kelompok Quad dalam WTO, dan hubungan dengan anggota-anggota WTO yang lain, serta kondisi perekonomian global. Namun pada kasus Arab Saudi, dengan syarat dan tahapan yang sama dengan negara-negara calon anggota WTO yang lain, akses keanggotaannya memakan waktu yang lebih lama. Selain itu, selama dua belas tahun proses akses, politik dalam negeri Arab Saudi juga mengalami dinamika. Sejak 1995, kondisi dalam negeri Arab Saudi terus mengalami dinamika. Arab Saudi merupakan suatu negara monarki dengan raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Raja Fahd adalah raja yang dianggap membawa modernitas bagi Arab Saudi dan liberalisasi serta persatuan negara timur tengah sejak 1982. Namun pada 1995 Raja Fahd terserang *stroke*, sehingga secara *de facto* kemudian kepemimpinan Arab Saudi dipegang oleh Putra Mahkota Abdullah. Abdullah menggantikan peran Raja Fahd memimpin Arab Saudi dengan baik (http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Saudi_Arabia.pdf). Sejak 1995, Arab Saudi terus melakukan perubahan dalam struktur pemerintahannya, termasuk berusaha untuk menjadi lebih terbuka dalam bidang perdagangan. Dinamika politik dalam negeri Arab Saudi tersebut dapat dikaitkan dengan lamanya proses akses keanggotaannya dalam WTO.

Negosiasi-negosiasi Arab Saudi dalam akses keanggotaan WTO adalah bagian dari kebijakan luar negeri Arab Saudi yang berdampak pada kebijakan-kebijakan

perdagangannya. Menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen, proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi faktor domestik atau dalam negeri (Mintz & DeRouen 2010, 133). Spero dan Hart menyebutkan bahwa kebijakan perdagangan adalah urusan politik domestik (Spero & Hart 2003, 66). Berkaitan dengan kebijakan perdagangan dan akses keanggotaan WTO, maka dapat dikatakan bahwa akses adalah hasil formulasi kebijakan-kebijakan perdagangan. Dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang lain, kebijakan perdagangan adalah kebijakan yang paling mendapat pengaruh dari dinamika dalam negeri (Spero & Hart 2003, 66). Kebijakan mengenai tarif, kuota, dan hambatan non-tarif berkaitan dengan kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat sehingga kebijakan perdagangan pada umumnya melibatkan politik dalam negeri dengan porsi yang cukup besar. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bergabungnya suatu negara ke dalam WTO akan memberikan dampak seperti terintegrasinya perekonomian suatu negara pada perekonomian global, terjadinya reformasi di dalam negeri, membuka pasar baru bagi industri domestik, seperti mengundang investasi asing. Dampak-dampak tersebut secara langsung akan mempengaruhi kebijakan nasional di Arab Saudi dan berdampak pula pada kelompok-kelompok kepentingan, termasuk kelompok bisnis di negara tersebut.

Dari sektor ekonomi, Arab Saudi adalah salah satu Negara Teluk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Timur Tengah dan dalam dua dekade terakhir telah melakukan reformasi dan transformasi ekonomi cukup mendasar, sehingga tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru bukan saja di kawasan tapi di dunia, termasuk menjadi salah satu anggota G-20 (<http://www.kemlu.go.id/jeddah/Books/Panduan%20Bisnis.pdf>). Sebagai sumber utama penghasilan Arab Saudi adalah minyak bumi dan diperkirakan cadangan minyaknya mencapai 25% dari keseluruhan cadangan minyak dunia atau 263 milyar barrel. Sektor minyak Arab Saudi, tercatat menyumbang sekitar 80% dari anggaran penghasilannya, 45% dari GDP dan 90% dari ekspor penghasilan (<http://www.kemlu.go.id/jeddah/Books/Panduan%20Bisnis.pdf>). Arab Saudi sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia menjadikannya sebagai *rentier state*. *Rentier state* dalam kajian ekonomi politik berarti negara yang perekonomiannya bergantung pada pemasukan yang berasal dari pinjaman yang ia berikan pada luar negeri (Wilson 2004, 8). Sejak terjadinya *oil boom* pada 1970-an, Arab Saudi menikmati pemasukan perekonomiannya dari ekstraksi dan ekspor minyak ke negara lain, yang kemudian memunculkan istilah *oil rents* atau “peminjaman” minyak kepada pihak asing yang kemudian membayarnya pada pemerintah Arab Saudi. Status sebagai *rentier state* tersebut membuat Arab Saudi menikmati statusnya yang independen, serta sektor bisnis dalam negerinya yang bergantung pada pinjaman pemerintah. Selain itu, berbagai aktor non-negara juga terlibat dalam perekonomian Arab Saudi antara lain organisasi-organisasi yang bergelut di bidang perdagangan, asosiasi pengusaha minyak, perusahaan-perusahaan minyak, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka ada keterkaitan antara politik dalam negeri dengan lamanya proses akses. Tulisan ini akan membahas bagaimanakah politik dalam negeri Arab Saudi mempengaruhi lamanya akses keanggotaannya ke dalam WTO.

Pendekatan *Two-Level Game* dan Model Pembuatan Kebijakan Luar Negeri *Bureaucratic*

Berkaitan dengan peringkat analisis negara yang digunakan dalam penelitian ini, kebijakan luar negeri atau *foreign policy* dipandang sebagai kelanjutan dari *domestic policy*, karena di dalam *foreign policy* tersebut berisi hal-hal yang mencerminkan kepentingan nasional suatu negara (Plano 1969). Menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen, kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh beberapa determinan dari dalam negeri antara lain kondisi ekonomi, kepentingan ekonomi, opini publik, siklus pemilu, dan *two-level game* (Mintz & DeRouen 2010, 131). Pendekatan *two-level game* yang dikembangkan oleh Robert Putnam akan menjelaskan bagaimana terjadinya proses interaktif yang terjadi saat pemimpin suatu

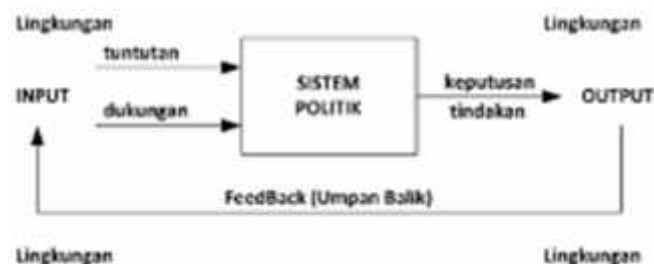
negara bernegosiasi dalam perjanjian yang melibatkan sistem internasional dan domestik sekaligus (Mintz & DeRouen 2010, 133). Putnam menjelaskan bahwa *Two-level game* terdiri dari negosiasi internasional di mana pemimpin suatu negara mencapai kesepakatan dengan negara lain dan negosiasi domestik di mana pemimpin negara berusaha agar kesepakatan-kesepakatan tersebut diterima oleh legislatif dan konstituen domestik dalam pemerintahannya (Mintz & DeRouen 2010, 133). Boukhars (2001) kemudian mengasumsikan bahwa politik domestik suatu negara bisa berdampak pada kesuksesan negosiasi internasional. Politik domestik yang dimaksud melibatkan sejumlah aktor, proses, dan *influences* yang memiliki pengaruh kuat pada perjanjian internasional sebagai akhirnya (Mintz & DeRouen 2010, 133).

Berkaitan dengan sistem pemerintahan dan cara pengambilan keputusan Arab Saudi, maka model pengambilan kebijakan luar negeri *bureaucratic* dapat digunakan dalam menjelaskan pengaruh politik dalam negeri Arab Saudi terhadap kebijakan luar negerinya. Model tersebut menjelaskan proses pengambilan kebijakan luar negeri yang terdesentralisasi dan melibatkan banyak aktor dan banyak agensi (Mintz & DeRouen 2010, 71). Model keputusan birokratis lebih memfokuskan pandangan pada struktur organisasi pada pembuatan keputusan (Mintz & DeRouen 2010, 71). Dalam pengambilan keputusan model birokratis, keputusan lahir dari perjuangan politik dan tawar-menawar di antara kelompok-kelompok pembuat keputusan. Pada intinya, model pengambilan keputusan birokratis memandang sebuah keputusan terlahir bukan dari aktor tunggal melainkan dari pemikiran, kepentingan, dan tawar-menawar beberapa aktor pembuat keputusan. Menurut Cashman (1993) hal ini pada akhirnya, menyebabkan pengambilan keputusan yang terfragmentasi (Mintz & DeRouen 2010, 71).

Teori Sistem Politik David Easton

Fragmentasi dalam pemerintahan dan pengaruhnya pada pengambilan keputusan-keputusan terkait proses akses keanggotaan Arab Saudi dalam WTO dapat dijelaskan melalui teori sistem politik atau teori analisis input-output. Teori analisis input-output pertama kali dikemukakan oleh David Easton di dalam buku pertama yang terbit tahun 1953 (*The Political System*). Easton mengajukan argumentasi seputar perlunya membangun satu teori umum yang mampu menjelaskan sistem politik secara lengkap (Easton 1965, 3). Dalam sistem politik Easton, sistem yang baik harus memiliki diferensiasi kerja. Di masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Terdapat sejumlah aktor yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Masing-masing aktor tersebut terintegrasi dalam suatu sistem. Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Skema berikut adalah gambaran teori input-output yang diungkapkan oleh David Easton.

Gambar 1.2 Skema Kerja Sistem Politik Easton



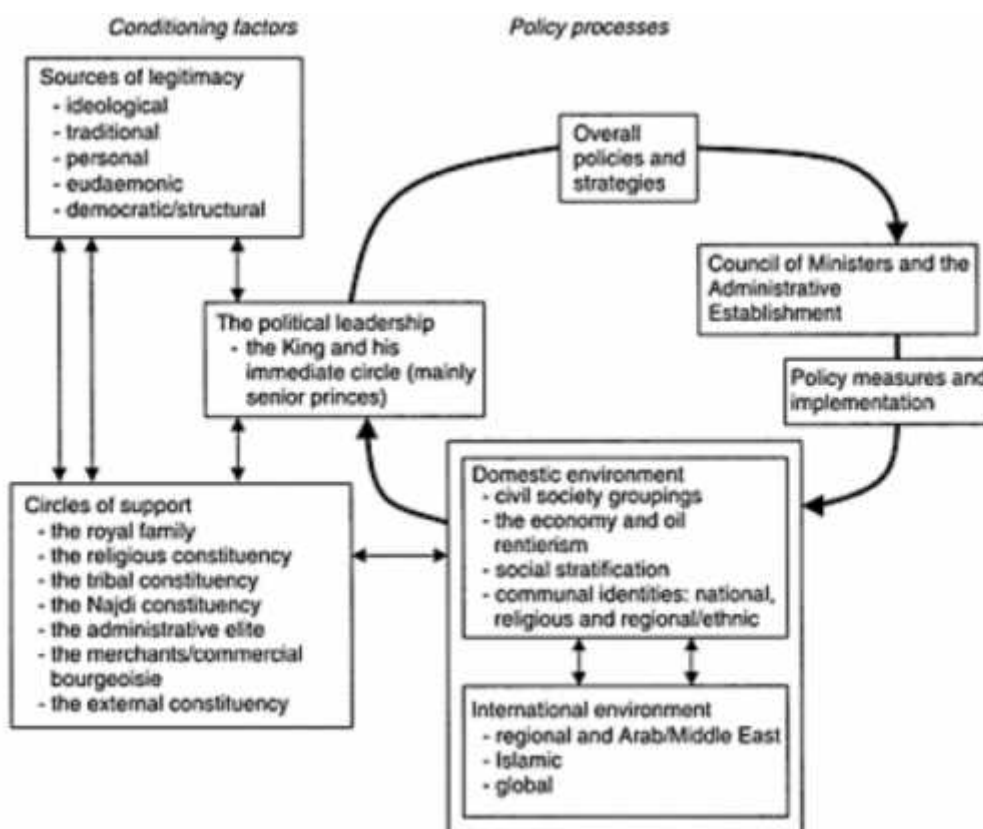
Sumber: Easton 1965, 121

Dalam gambar diatas, sistem dijelaskan sebagai sebuah sistem perilaku, lingkungan dijelaskan sebagai suatu sistem yang bisa dibedakan atau berada di luar sistem perilaku

tersebut serta memberikan pengaruh bagi sistem di dalamnya. Keputusan dan tindakan bisa berbeda-beda berdasarkan proses dan struktur yang terjadi di dalam sistem maupun pengaruh dari luar. Umpan balik adalah hasil perilaku atau output, bisa juga implementasi keputusan yang dihasilkan sistem, yang kemudian memberikan respon juga sebagai masukan untuk sistem itu sendiri (Easton 1965, 25).

Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki dua corak yaitu positif (meneruskan) dan negatif (menolak) kinerja sebuah sistem politik. Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai *output*, yang menurut Easton berkisar pada dua entitas yaitu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). *Output* ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan *feedback* (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklus. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai. Di Arab Saudi, sesuai dengan teori sistem politik David Easton terwujud dalam model politik dalam negerinya yaitu menggunakan sistem birokratis yang terdiri dari faktor pembentuk kebijakan dan proses pembuatan kebijakan. Bagan 2.1 menunjukkan bagaimana proses pengambilan kebijakan dalam model politik Arab Saudi.

Bagan 2.1 Model Politik Arab Saudi



Sumber: Niblock 2006, 7

***Rentier State Theory* dan Pengaruhnya terhadap Arab Saudi**

Sesuai pendapat Alex Mintz dan Karl DeRouen, perekonomian adalah salah satu determinan yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Kondisi

perekonomian Arab Saudi dan dampaknya pada pengambilan kebijakan luar negeri dapat dijelaskan menggunakan teori *rentier state*. *Rentier state* dalam kajian ekonomi politik berarti negara yang perekonomiannya bergantung pada pinjaman yang ia berikan pada luar negeri (Wilson 2004, 8). *Rentier state* ini dapat disederhanakan sebagai negara pengekspor minyak. Menurut Beblawi, *rentier state* memiliki empat karakter yaitu situasi peminjaman yang mendominasi, perekonomian yang bergantung pada peminjaman asing sehingga tidak terlalu membutuhkan produktivitas sektor domestik, peminjaman dibayar secara langsung kepada pemerintah negara sehingga pemerintah memiliki otoritas tertinggi untuk mendistribusikan kekayaan tersebut, dan hanya sedikit yang berpartisipasi dalam produksi komoditas yang dipinjamkan, sebagian besar terlibat dalam distribusi dan penggunaannya (Beblawi 1987, 87-88). Menurut *Rentier state theory* kekayaan minyak tidak sesuai dengan rezim demokratis dan juga tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi (Celik 2013, 35).

Negara dengan status *rentier state* bersifat otonom dari masyarakat. Ketidadaan proses demokrasi dan institusi adalah salah satu hasil dari *rentiersm* (Gray 2011, 10). Status sebagai *rentier state* memberikan dua dampak utama pada suatu negara modern. Pertama, *rentiersm* yang sangat tinggi akan berdampak negatif pada fungsi negara modern sebagai representasi rakyatnya. Kedua, *rentiersm* yang tinggi berdampak positif pada fungsi negara modern dalam penyediaan kebutuhan dan kemakmuran rakyatnya. Kemakmuran yang tinggi serta alokasi kebutuhan yang tercukupi mengacu pada terciptanya kontrak sosial yang menggantikan hak-hak politik dengan kebutuhan yang disediakan oleh negara dan kooptasi kelompok sosial strategis (Ross 2001, 325).

Adanya pengaruh dari dampak globalisasi dan respon yang dibutuhkan untuk menghadapinya, perkembangan perekonomian negara, pertumbuhan penduduk, dan tekanan dari tenaga kerja memberikan perubahan pada konteks dan karakter *rentiersm* itu sendiri (Gray 2011, 23). *Rentier state* baru digambarkan dengan kondisi negara yang lebih *entrepreneurial*, mendukung perkembangan dan pembangunan, serta lebih responsif daripada sebelumnya (Gray 2011, 27). Namun nilai fundamental dari *rentier state* itu sendiri masih tetap berlaku di mana tidak ada proses demokrasi dalam pengambilan kebijakan. Absennya proses demokrasi dalam pengambilan kebijakan menciptakan suatu kondisi otonomi pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Otonomi yang terbentuk secara vertikal terhubung pada kepala pemerintahan dan lingkaran kecilnya sebagai pembuat keputusan. Beberapa agensi dalam pemerintahan tidak bekerja secara efektif sedangkan sebagian lainnya bekerja cukup efektif.

Sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia dengan pendapatan perkapita lebih dari 7000 USD, Arab Saudi menjadi negara pengekspor terbesar ke 18 dan negara importir terbesar ke 26 pada perdagangan dunia tahun 1997 (<http://www.meti.go.jp/english/report/data/gCT9916e.html>). Sebagai sumber utama penghasilan Arab Saudi adalah minyak bumi dan diperkirakan cadangan minyaknya mencapai 25% dari keseluruhan cadangan minyak dunia atau 263 milyar barrel. Sektor minyak Arab Saudi, tercatat menyumbang sekitar 80% dari anggaran penghasilannya, 45% dari GDP dan 90% dari ekspor penghasilan (<http://www.kemlu.go.id/jeddah/Books/Panduan%20Bisnis.pdf>). Menurut Schlumberger (2002), Arab Saudi tergolong sebagai *resource-rich country* atau negara yang kaya sumber daya dan menganut rezim tradisional-otoritarian (Celik 2013, 2). Arab Saudi sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia menjadikannya sebagai *rentier state*. *Rentier state* dalam kajian ekonomi politik berarti negara yang perekonomiannya bergantung pada pinjaman yang ia berikan pada luar negeri (Wilson 2004, 8). Sejak terjadinya *oil boom* pada 1970-an, Arab Saudi menikmati pemasukan perekonomiannya dari ekstraksi dan ekspor minyak ke negara lain, yang kemudian memunculkan istilah *oil rents* atau “peminjaman” minyak kepada pihak asing yang kemudian membayarnya pada pemerintah Arab Saudi. Status sebagai *rentier state* tersebut membuat Arab Saudi menikmati statusnya yang independen, serta sektor bisnis dalam negerinya yang bergantung pada pinjaman pemerintah.

Ekspor minyak yang tinggi menjadikan status ekonomi Arab Saudi independen sehingga membuat negara tersebut tidak bergantung pada aktor-aktor di luar negara, namun di sisi lain hal ini juga menyebabkan absennya partisipasi masyarakat di dalam negeri. *Rentiersm* berdampak secara positif dan negatif pada suatu negara (Ross 2001, 361). Pertama, *rentiersm* yang sangat tinggi akan berdampak negatif pada fungsi negara modern sebagai representasi rakyatnya. Kedua, *rentiersm* yang tinggi berdampak positif pada fungsi negara modern dalam penyediaan kebutuhan dan kemakmuran rakyatnya. Kemakmuran yang tinggi serta alokasi kebutuhan yang tercukupi mengacu pada terciptanya kontrak sosial yang menggantikan hak-hak politik dengan kebutuhan yang disediakan oleh negara dan kooptasi kelompok sosial strategis.

Otonomi yang dimiliki pemerintah Arab Saudi tersebut kemudian menciptakan aparat negara yang terfragmentasi, secara vertikal terhubung dengan raja dan lingkaran kecilnya yang terdiri dari pangeran-pangeran dan penasihat. Beberapa agensi tidak bekerja secara efektif sedangkan sebagian lainnya bekerja cukup efektif. Ketika pendapatan dari sektor minyak berdampak negatif pada sejumlah institusi dengan bertindak sebagai pemicu pencarian pinjaman, *patronage*, dan ekspansi birokrasi, sejumlah institusi yang lain bekerja sangat efektif dan efisien dalam pemilihan teknokrat untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang spesifik untuk mencapai kesuksesan. Berkaitan dengan akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO, WTO dianggap hanya sebagai tanggung jawab MOC saja, padahal pemerintah Arab Saudi telah membentuk satu struktur khusus untuk mengurus akses keanggotaan Arab Saudi dalam WTO.

Pada sistem pemerintahan Arab Saudi, fragmentasi sebagai konsekuensi *rentier state* berdampak pada sistem politik yang terfragmentasi antara sektor publik dan privat (Hertog 2010, 11). Pada akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO, fragmentasi pemerintahan tercermin dalam adanya struktur khusus yang menangani negosiasi-negosiasi terkait keanggotaan Arab Saudi dalam WTO. Fragmentasi pada sektor privat tercermin dari adanya tarik ulur kepentingan antara berbagai aktor-aktor bisnis terkait akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO. Tarik ulur kepentingan sektor privat itu sendiri tidak terlalu berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan, hanya sebagai dukungan dan peringatan saja bagi pemerintah. Fragmentasi antara pemerintah dan sektor privat terlihat dari persebaran informasi yang tidak merata sehingga memunculkan opini publik yang berbeda-beda mengenai konsekuensi maupun hasil negosiasi-negosiasi mengenai kebijakan perdagangan terkait akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO.

Rentiersm memberikan dampak positif bagi fungsi negara modern dalam penyediaan kebutuhan dan kemakmuran rakyatnya. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan rakyat dan sektor bisnis bergantung pada pinjaman dan bantuan pemerintah. Hal ini menjadi suatu *status quo* yang dinikmati oleh masyarakat. Akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO menimbulkan sejumlah ketakutan bahwa *status quo* yang dinikmati rakyat saat itu akan hilang dengan bergabungnya Arab Saudi ke dalam WTO. Akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO merupakan salah satu bagian dari perkembangan ekonomi, karena dengan bergabungnya Arab Saudi ke dalam WTO secara otomatis akan mengintegrasikan perekonomian Arab Saudi ke perekonomian global.

Pada tahun 1990-an berkembanglah suatu bentuk baru *rentier state*. Berbeda dengan teori *rentier state* klasik, *rentier state* baru mendapat banyak pengaruh dari dampak globalisasi dan respon yang dibutuhkan untuk menghadapinya, perkembangan perekonomian negara, pertumbuhan penduduk, dan tekanan dari tenaga kerja (Gray 2011, 23). Pengaruh-pengaruh tersebut memberikan perubahan pada konteks dan karakter *rentiersm* itu sendiri. *Rentier state* baru digambarkan dengan kondisi negara yang lebih *entrepreneurial*, mendukung perkembangan dan pembangunan, serta lebih responsif daripada sebelumnya (Gray 2011, 27). Namun nilai fundamental dari *rentier state* itu sendiri masih tetap berlaku di mana tidak ada proses demokrasi dalam pengambilan kebijakan.

Lamanya akses keanggotaan Arab Saudi dapat dikaitkan dengan status Arab Saudi sebagai *rentier state*, baik klasik maupun baru. Sebagai *rentier state*, Arab Saudi memiliki keistimewaan untuk melaksanakan negosiasi kebijakan ekonominya secara domestik terbukti sejak terjadinya perang teluk pada awal tahun 1990-an, pemerintah Arab Saudi tidak memiliki hutang internasional, selain itu *World Bank* dan IMF serta aktor lainnya hanya bertindak sebagai konsultan yang dibayar pemerintah, bukan sebagai kreditur yang bisa memaksakan pendapatnya pada pembuatan kebijakan Arab Saudi (Hertog 2010, 223). Pembuatan kebijakan ekonomi Arab Saudi tetap mempertimbangkan kompetisi internasional walaupun tanpa adanya keterlibatan aktor politik di luar negara.

Status sebagai “*rentier state* baru” juga dipengaruhi oleh dinamika harga minyak. Menurut Relooney, *Rentier state* mengalami kesulitan saat harga minyak jatuh dan ketika tidak ada perkembangan ekonomi jangka panjang (Gray 2011, 27). Pada tahun 1998, terjadi penurunan harga minyak secara drastis menjadi 11.9 US\$ per barrel yang memicu terjadinya krisis ekonomi ditambah dengan terjadinya ledakan jumlah penduduk di Arab Saudi sebesar 4.1% yang menjadikannya salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia. Kedua fenomena tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran terutama penduduk di usia muda yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan karena krisis harga minyak yang secara langsung berdampak pada perekonomian Arab Saudi yang kemudian memicu munculnya pemikiran dari pemerintah dan sejumlah kalangan bahwa saat itu adalah saat yang tepat untuk melakukan reformasi ekonomi di Arab Saudi. Salah satu wujud dari reformasi ekonomi tersebut adalah kebijakan Abdullah bin Abdul Aziz, putra mahkota yang memegang kekuasaan tertinggi saat itu untuk mengundang investasi dari perusahaan-perusahaan asing pada sektor gas alam (SAMBA 2005, 2-7). Selain itu juga dibentuk SAGIA (*Saudi Arabia General Investment Authority*) yang bertanggung jawab pada proses aplikasi investasi. Kondisi Arab Saudi yang sedang mengalami reformasi ekonomi tersebut juga berdampak pada meningkatnya ketertarikan pada WTO.

Pada tahun 2000, terjadi tren positif pada pasar minyak. Harga minyak meningkat sebanyak 10\$ per barrel sejak 1999. Sebagai dampaknya, GDP Arab Saudi meningkat dari 0,4% pada 1999 menjadi 4,5% pada 2000 (SAMBA 2005, 1). Menguatnya harga minyak tersebut berdampak pada proses akses keanggotaan Arab Saudi yang tersendat. Karakteristik sebagai *rentier state* kembali menonjol dalam akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO di mana muncul pemikiran-pemikiran bahwa tanpa WTO, Arab Saudi tetap bisa meningkatkan GDP dan perekonomiannya. Hal ini kemudian berdampak pada terjadinya ‘*pause*’ pada proses akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO.

Beberapa karakteristik Arab Saudi sebagai *rentier state* baru adalah keterbukaan pada globalisasi namun tetap dengan proteksi, perekonomian yang aktif dan kebijakan pembangunan, pengaturan sektor energi dan bukan lagi ketergantungan pada sektor energi, pemikiran jangka panjang pemerintah, serta kebijakan luar negeri yang lebih aktif dan inovatif (Gray 2011, 41). Berkaitan dengan hal-hal tersebut, peranan sektor bisnis juga semakin meningkat dalam perekonomian Arab Saudi seperti berkembangnya perusahaan besar di Arab Saudi adalah SABIC, Aramco, dan SAVOLA Group. Bergabungnya Arab Saudi ke dalam WTO merupakan salah satu wujud keterbukaan pada globalisasi, ditambah dengan pikiran jangka panjang pemerintah, dan wujud kebijakan luar negeri yang aktif. Namun status *rentier state* Arab Saudi tetap menjadi hambatan tersendiri dalam setiap negosiasi dalam proses akses keanggotaannya dalam WTO.

Kesimpulan

Pada tahun 2005, Arab Saudi akhirnya resmi menjadi anggota rezim perdagangan internasional WTO sebagai anggota yang ke 149. Keberhasilan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dicapai oleh pemerintah Arab Saudi karena memakan waktu dua belas tahun dan melalui proses yang sangat rumit. Proses akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO

tersebut menjadi salah satu proses akses yang terlama di WTO. Proses panjang akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO menunjukkan *two-level game* sebagaimana dijelaskan oleh Putnam. Negosiasi-negosiasi selama proses akses menuntut pemerintah Arab Saudi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang juga diterima oleh legislatif dan konstituen domestik dalam pemerintahannya, dengan kata lain dalam proses akses WTO pemerintah Arab Saudi di samping bernegosiasi dengan anggota-anggota WTO juga harus bernegosiasi dengan aktor-aktor di dalam negerinya.

Dari sejumlah data-data dan fakta yang didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lamanya proses akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: politik dalam negerinya yang terfragmentasi, adanya pengaruh dari sektor ekonomi sebagai bagian dari politik dalam negeri tersebut, dan syariat Islam sebagai sistem legal yang menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan di Arab Saudi tak terkecuali aspek politik dan ekonomi.

Pertama, Fragmentasi dalam pemerintahan Arab Saudi digambarkan dengan pengambilan keputusan yang tidak terpusat dan kurangnya koordinasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan proses akses keanggotaan Arab Saudi dalam WTO. Fragmentasi tersebut menurut model pengambilan kebijakan luar negeri *bureaucratic* disebabkan oleh pengambilan sebuah keputusan yang terlahir bukan dari aktor tunggal melainkan dari pemikiran, kepentingan, dan tawar-menawar beberapa aktor pembuat keputusan. Pada akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO, fragmentasi pemerintahan tercermin dalam adanya struktur khusus yang menangani negosiasi-negosiasi terkait keanggotaan Arab Saudi dalam WTO. Beberapa agen pemerintah yang terlibat dalam akses keanggotaan Arab Saudi dalam WTO adalah COM (*Council of Minister*), HMC (*Higher Ministerial Committee*), MC (*Ministerial Committee*), dan SNT (*Saudi Negotiating Team*).

Fragmentasi pada sektor privat tercermin dari adanya tarik ulur kepentingan antara berbagai aktor-aktor bisnis terkait akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO. Tarik ulur kepentingan sektor privat tersebut berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan sebagai dukungan dan peringatan bagi pemerintah. Fragmentasi antara pemerintah dan sektor privat terlihat dari persebaran informasi yang tidak merata sehingga memunculkan opini publik yang berbeda-beda mengenai konsekuensi maupun hasil negosiasi-negosiasi mengenai kebijakan perdagangan terkait akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO. Keputusan-keputusan negosiasi terkait akses keanggotaan Arab Saudi dalam WTO adalah hasil tarik ulur kepentingan Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, ditambah dengan kepentingan dari kelompok bisnis dan *Majlis Ash-Shura*. Terfragmentasinya sistem politik Arab Saudi dan hubungan antara pemerintah dan sektor swasta yang juga kurang terkoordinasi dengan baik berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan mengenai aturan-aturan perdagangan untuk menyesuaikan diri dengan WTO.

Aspek kedua yang mempengaruhi lamanya proses akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO adalah aspek ekonomi. Perekonomian sebagai bagian dari politik dalam negeri suatu negara memberikan peran yang cukup besar dalam proses akses keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO. Perekonomian Arab Saudi mempengaruhi proses akses melalui dua cara yaitu melalui status sebagai *rentier state* dan melalui kepentingan-kepentingan ekonomi di dalam negeri dan kepentingan ekonomi pemerintah Arab Saudi. Pengaruh status Arab Saudi sebagai *rentier state* mengakibatkan sistem pemerintahan yang terfragmentasi sehingga memperlambat pengambilan keputusan selama proses negosiasi. Menurut *rentier state theory*, *rentier state* tidak cocok dengan demokrasi dan perkembangan ekonomi. Hal ini kemudian juga ditemukan di Arab Saudi sebagai *resource-rich country* sekaligus sebagai negara dengan rezim otoritarian tradisional. Menurut teori *rentier state* klasik, suatu negara dengan status sebagai *rentier* bersifat otonom dari masyarakat, di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Otonomi negara dengan status *rentier state* tidak hanya otonomi dari masyarakat saja tetapi juga otonomi dari pengaruh asing dalam

pembuatan kebijakannya. Selain itu, status Arab Saudi sebagai *rentier state* memberikan *privilege* pada masyarakat termasuk masyarakat bisnis untuk menikmati pendapatan pemerintah yang berasal dari ekspor minyak serta berbagai subsidi dari pemerintah dalam berbagai bidang. *Privilege* tersebut menjadi suatu *status-quo* yang tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat dengan bergabung dalam WTO.

Sedangkan pengaruh kepentingan-kepentingan ekonomi dalam proses aksesinya terwujud dalam negosiasi-negosiasi kebijakan perdagangan seperti negosiasi mengenai kebijakan tarif, pajak, larangan impor, dan saudisasi tenaga kerja. Negosiasi-negosiasi yang berjalan cukup alot tersebut berkaitan dengan kepentingan pemerintah Arab Saudi untuk melindungi pasar domestik dari persaingan-persaingan yang akan masuk ke Arab Saudi setelah bergabung dalam WTO. Di samping itu, aktor-aktor bisnis Arab Saudi seperti SABIC, Saudi Aramco, dan Savola Group juga terlibat dalam tarik ulur kepentingan antara membuka pasar yang lebih luas dan memproteksi bisnisnya dari ancaman-ancaman bisnis dari luar negeri yang semakin mudah masuk ke Arab Saudi setelah menjadi anggota WTO.

Selanjutnya aspek yang ketiga, syariat Islam sebagai sistem legal yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi juga sangat berpengaruh dalam setiap pembuatan kebijakan, termasuk kebijakan perdagangan terbukti dengan adanya larangan impor komoditas-komoditas yang haram menurut syariat Islam seperti daging babi dan alkohol. Selain itu syariat juga memiliki tata cara dan aturan sendiri dalam dunia perbankan. Pengaruh kuat syariat Islam tersebut juga menjadi hambatan dalam negosiasi-negosiasi kebijakan perdagangan dalam proses aksesinya karena penggunaan syariat sebagai legitimasi kebijakan dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan MFN dalam WTO. Syariat Islam yang begitu mendasar di Arab Saudi juga mendorong terciptanya opini-opini publik mengenai aksesinya keanggotaan Arab Saudi dalam WTO. Opini-opini yang muncul tersebut berkaitan dengan ancaman pada sektor bisnis seperti meningkatnya persaingan dalam negeri dan meningkatnya jumlah pengangguran dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran syariat Islam yakni munculnya ketakutan-ketakutan dan opini publik tentang keanggotaan WTO yang akan membuka jalan bagi masuknya komoditas-komoditas yang dilarang oleh syariat seperti daging babi dan alkohol.

Demikianlah politik dalam negeri Arab Saudi yang terfragmentasi dan kepentingan ekonomi sebagai bagian dari politik dalam negeri mempengaruhi lamanya proses aksesinya. Ekonomi dan politik dalam negeri Arab Saudi yang memiliki hubungan timbal balik tersebut turut mempengaruhi lamanya proses aksesinya. Selain dua hal tersebut pengaruh kuat Syariat Islam sebagai sistem legal juga berpengaruh selama proses aksesinya karena Syariat Islam juga menjadi dasar dalam politik dalam negeri dan perekonomian Arab Saudi. Dengan negosiasi sebagai salah satu tahapan dalam aksesinya keanggotaan dalam WTO, tidak bisa dipungkiri bahwa lamanya proses aksesinya keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar negara seperti birokrasi di dalam WTO, adanya kelompok Quad yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Kanada. Namun bagaimanapun juga setiap kebijakan yang dibuat dalam aksesinya keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO merupakan hasil dari proses politik di dalam negeri yang dipengaruhi dinamika di dalam negeri Arab Saudi.

Beberapa area penelitian yang juga prospektif terkait aksesinya keanggotaan Arab Saudi ke dalam WTO adalah dampaknya terhadap perekonomian Arab Saudi setelah resmi menjadi anggota WTO pada 2005. Selain itu, hingga saat ini sejumlah negara masih terlibat dalam proses aksesinya untuk menjadi anggota WTO. Beberapa di antaranya adalah negara-negara Timur Tengah seperti Iraq, Iran, Yaman, dan Afghanistan dan negara-negara Afrika seperti Libya, Algeria, dan Ethiopia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih banyak negara-negara yang belum menjadi anggota WTO karena masih terlibat dalam proses aksesinya. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan terkait proses aksesinya negara-negara tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Bourland, Brad, John Sfakianakis, & Gasim Abdulkarim. *Saudi Arabia and the WTO*. Riyadh: Samba Financial Group, 2006.
- Beblawi, Hazem. "The Rentier State in the Arab World." dalam *The Rentier State: Nation, State and the Integration of the Arab World*, diedit oleh Hazem Beblawi dan Giacomo Chemingui, Mohammad Abdelbasset & Raed Safadi. *Saudi Arabia Long Road to WTO Membership The Potential Payoffs*. Riyadh, 2008.
- Easton, David. *A Framework for Political Analysis*. Chicago : The University of Chicago Press, 1965.
- Gray, Matthew. *A Theory of "Late Rentiersm" In the Arab States of the Gulf*. Georgetown: Georgetown University Press, 2011.
- Hertog, Steffen. *Princes, brokers and bureaucrats: oil and the state in Saudi Arabia*. Ithaca: Cornell University Press, 2011.
- Jenie, Rezlan Ishar . *Sekilas WTO edisi ke 6*. Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Multilateral. Kementerian Luar Negeri, 2010.
- JE Spero dan JA Hart, *The Politics of International Economic Relations (6th Edition)*. Belmont: Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc., 2003.
- Mintz, Alex & Karl DeRouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Niblock, Tim & Monica Malik, *The Political Economy of Saudi Arabia*. London: Routledge, 2007.
- Niblock, Tim. *Saudi Arabia Power, Legitimacy and Survival*. London: Routledge, 2006.
- Plano, Jack C dan Ray Olton. *International Relations Dictionary*. New York : New York Holt, 1969.
- Wilson, Rodney, Abdullah Al-Salamah, Malik, Monica, dan Ahmed Al-Rajhi. *Economic Development in Saudi Arabia*. London and New York: RoutledgeCurzon, 2004.

Artikel Jurnal

- Celik, Ahmet Alkan. "Economic Barriers to Democratization in MENA," *Emerging Market Journal* Vol. 3 (2013): 35-49
- Hertog, Steffen. "Two-level negotiations in a fragmented system: Saudi Arabia's WTO accession," *Review of international political economy*. 15 (4). (November 2008): 1-27
- Ross, Michael. "Does Oil Hinder Democracy?" *World Politics* 53, no. 3 (2001): 325-361.
- Anonim. "Saudi Arabia: WTO Accession to Yield Gradual Change." *Oxford Analytical Daily Brief Service*. (2 November 2005).

Evenett, Simon J & Carlos A. Primo Braga. "WTO Accession : Lesson from Experience."
<http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Pubs/TradeNote22.pdf> (diakses tanggal 30 Maret 2013)

Sumber Internet

"Understanding the WTO," *World Trade Organization*,
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm (diakses tanggal 30 Maret 2013).

"Members and Observers," *World Trade Organization*,
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (diakses tanggal 30 Maret 2013).

Simon J Evenett dan Carlos A. Primo Braga, "WTO Accession : Lesson from Experience,"
<http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Pubs/TradeNote22.pdf> . Pasal-pasal dalam Marakesh Agreement yang berkaitan dengan akses anggota baru WTO bisa dilihat pada lampiran 2.

"China and the WTO," *World Trade Organization*,
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm (diakses tanggal 10 April 2013)

"Oman and the WTO," *World Trade Organization*,
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/oman_e.htm (diakses tanggal 10 April 2013)

"Saudi Arabia: WTO accession to Yield Gradual Change," *Oxford Analytica Daily Brief Service*, 2 November, 2005, http://www.relooney.info/SI_Milken-Arabia/Oxford-Arabia_26.pdf (diakses tanggal 10 April 2013)

Don McClatchy, "Accession to the WTO: Procedures, Issues, and Lessons for Syria from Recent Experiences (2004)"
http://www.fao.org/world/syria/gcpita/pubs/policystudies/19-SyrAccessWTO-En_1-36.pdf Hlm. 1 (diakses tanggal 30 Maret 2013)

"The World Fact Book: Saudi Arabia," *Central Intelligence Agency*,
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html> (diakses tanggal 5 Mei 2013).

Washington DC, Royal Embassy of Saudi Arabia. "The Basic Law Of Governance,"
http://www.saudiembassy.net/about/country-information/laws/The_Basic_Law_Of_Governance.aspx (diakses tanggal 5 Mei 2013).

"Understanding WTO: The Principles," *World Trade Organization*,
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/utw_chap1_e.pdf (diakses tanggal 5 Mei 2013)

"Country Profile: Saudi Arabia, September 2006," *Library of Congress – Federal Research Division*, http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Saudi_Arabia.pdf (diakses tanggal 5 Mei 2013).

Jeddah, Konsulat Jendral RI. "Panduan & Tata Cara Bisnis di Arab Saudi,"
<http://www.kemlu.go.id/jeddah/Books/Panduan%20Bisnis.pdf> (diakses tanggal 31 Maret 2013).

Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry. "Issue Regarding Accession of China
Russia Vietnam Taiwan and Saudi Arabia to the WTO,"
<http://www.meti.go.jp/english/report/data/gCT9916e.html> (diakses tanggal 8 Juni
2013).